

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Jepang telah melakukan upaya-upaya dalam memerangi kejahatan *Sex Trafficking* dengan membuat program *Action Plan*. Program *Action Plan* ini mengambil nama *Japan's Action Plan to Combat Trafficking in Persons*, yang bertujuan untuk menekan angka *Human Trafficking* di Jepang. Berdasarkan penelitian ini, program *Action Plan* dari Jepang ini memuat beberapa hal penting di antaranya:

Pertama, Jepang membangun koneksi lebih kuat dengan negara-negara lain dan juga organisasi internasional dengan tujuan untuk membahas isu-isu tentang *Human Trafficking* serta sebagai wadah berbagi informasi. Hal ini dilakukan oleh Jepang juga untuk membangun citra dirinya setelah mendapat predikat buruk oleh Amerika Serikat dalam penanganan *Human Trafficking*.

Kedua, merevisi aturan terkait visa “*entertainer*” yang sebelumnya pada pengimplementasian aturan tersebut sering disalah gunakan oleh para *Traffickers* untuk memasukkan korban *Sex Trafficking* ke Jepang. Revisi ini memperketat warga negara asing yang masuk ke Jepang menggunakan visa “*entertainer*” dengan memeriksa secara benar apakah orang tersebut memiliki kemampuan sesuai bidangnya.

Ketiga, menegakkan hukum *Anti-Prostitution Law* dengan lebih baik. Setelah program ini dirumuskan, Pemerintah Jepang kembali menegakkan hukum ini dengan melakukan penangkapan besar-besaran terhadap aktivitas prostitusi paksa serta meningkatkan *public awareness* di masyarakat Jepang sendiri.

Dalam memerangi kejahatan *Sex Trafficking* tersebut, Jepang mengalami kendala utama yaitu Yakuza, yang menguasai hampir seluruh aktivitas *Sex Trafficking* di Jepang. Yakuza memiliki alur yang cukup terorganisasi dalam melakukan aksi *Sex Trafficking*. Tiga Yakuza terbesar di Jepang yaitu Yamaguchi-gumi, Sumiyoshi-kai, dan Inagawa-kai bertanggung jawab dalam aktivitas *Sex Trafficking* ini. Mereka dibantu oleh beberapa perusahaan serta kelompok bantu seperti Kokusai Kogyo 21, Zengeiren, dan Keiyukai yang memiliki tugasnya masing-masing dalam membantu Yakuza menjalankan aktivitas *Sex Trafficking* ini. *Culture of Tolerance* serta politik yang dijalankan oleh Yakuza juga memainkan peran penting dalam keberhasilan Yakuza menjalankan segala aktivitasnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah disampaikan sebelumnya, peneliti memiliki saran yang dapat diusulkan dari penelitian ini. Adapun saran yang dapat diusulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Peneliti berharap Pemerintah Jepang merevisi kembali hukum *Anti-Prostitution Law*, khususnya pada bagian definisi daripada

memilih cara lain seperti menegakkan hukum tersebut dengan lebih ketat.

- b) Pemerintah Jepang perlu untuk membuat kebijakan yang lebih tegas dalam menghadapi Yakuza seperti melarang keberadaan Yakuza secara hukum.
- c) Masyarakat Jepang perlu untuk menghilangkan *Culture of Tolerance* yang mentolerir segala tindakan prostitusi serta aktivitas Yakuza dalam *Sex Trafficking* ataupun aktivitas kejahatan lainnya di Jepang agar upaya Jepang dalam memerangi *Sex Trafficking* dapat terlaksana dengan baik.